



PT BPR Sadhu Artha

Bank
Sadhu Artha

"Maju, Tumbuh dan Berkualitas"

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA 2025

PT BPR SADHU ARTHA

JL. PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA, SABA, KEC.
BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR, BALI 80581



I. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR. SADHU ARTHA
Alamat	JL. By Pass Prof Dr. Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kec. Blahbatuh - GIANYAR
Nomor Telepon	0361 -8979005

Penjelasan Umum:

Penerapan pelaksanaan Tata Kelola BPR Sadhu Artha, sepanjang periode laporan ini, telah diupayakan melalui pengungkapan seluruh aspek yang dinilai dengan prinsip keterbukaan. Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 08 Januari 2025 Notaris Luh Eka Nadi Antara, SH.M.Kn, susunan pengurus PT. BPR. Sadhu Artha, adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : - Komisaris : I Ketut Sudarsa, S.E., Direktur Utama : Pande Ketut Tamara Ardhanareswari, S.Hub.Int., M.M., Direktur : Ir. I Komang Ginarsa. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dari OJK. Dengan susunan Pengurus yang belum lengkap, maka pelaksanaan penerapan tata kelola berjalan relatif baik namun memerlukan ekstra perhatian untuk menyeimbangkan fungsi bisnis dan kepatuhan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

I.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanareswari, S.Hub.Int., M.M.
	Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain : membantu direktur dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR, memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja, membudayakan



kepatuhan dan sadar risiko.

c. menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya.

e. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.

f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

h. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Jabatan	Direktur YMF Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

a. bersama Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan BPR.

b. mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain : melakukan pengawasan operasional BPR, menghimpun dana, menerima penempatan dana dari bank lain, menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.

c. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APUPPT.

d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2025, sbg berikut:

1. Pemenuhan struktur pengurus anggota Dewan Komisaris yang saat ini sudah dilengkapi oleh 1 anggota Dewan Komisaris dan masih dalam proses pemenuhan struktur Dewan Komisaris yang lengkap
2. Mengangkat PE Kepatuhan dan MR yang diupayakan dari SDM internal sehingga penguatan kapasitas fungsi kepatuhan, manajemen risiko, APU PPT- PPPSPM saat ini mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan masih proses belajar, dan fungsi audit internal yang saat ini masih perlu pembinaan-pembinaan sehingga kedua fungsi tersebut dapat meningkatkan kualitas pemutusan Komite Kredit dan sistem pengendalian internal yang lebih baik
3. Digitalisasi dan penyempurnaan kembali SOP, deskripsi tugas dan tanggung jawab tiap unit/fungsi yang jelas dan terarah (menyusun KPI) beberapa sudah berjalan dan sedang dikembangkan
4. Mengevaluasi program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karir untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sedang dalam tahap evaluasi dan pengembangan
5. Menyusun program- program yang bertujuan untuk penguatan budaya perusahaan yaitu budaya KASIH
6. Menyusun kebijakan perencanaan biaya pendidikan yang tepat guna sesuai dengan visi dan misi BPR, dengan mengangkat bibit regenerasi staf SDM untuk memperkuat bidang SDM
7. Mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan operasional terkait perlindungan konsumen



dengan sudah terselenggaranya RIPLAY dan pengembangan layanan pengaduan nasabah
8. Menyusun strategi untuk meningkatkan nilai kompetitif BPR, termasuk mengevaluasi life-cycle product serta bentuk pemasarannya, mengevaluasi strategi tabungan arisan, dan pelayanan/ pendekatan kepada nasabah

BPR tumbuh dengan sehat dan baik di tahun 2025 baik dari sisi kredit maupun penghimpunan dana. Beberapa tantangan yang menjadi fokus utama pada tahun ini adalah terkait penguatan tata kelola dan penguatan pada kuantitas maupun kualitas SDM sehingga apa yang sudah bertumbuh baik ini dapat terjaga dan berkelanjutan ke depan. Terutama dalam hal BPR saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dan terhadap penguatan BPR secara kelembagaan melalui pemenuhan- pemenuhan regulasi yang ada yang juga perlu menjadi perhatian. Adapun tantangan terhadap kondisi pariwisata maupun perekonomian Bali khususnya juga akan memberikan dampak terhadap kelangsungan BPR kedepannya. Untuk itu, penguatan modal masih menjadi fokus utama bagi BPR untuk dapat bertumbuh dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.
- Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- Terus melakukan monitoring dan pembinaan yang lebih intensif agar kesepakatan baru yang telah disetujui dalam dokumen pembinaan dapat dipenuhi setiap bulannya.
- Terdapt 4 (empat) debitur Macet agar tetap dilakukan penagihan sesuai dengan komitmen saat melakukan pembinaan terakhir, dan agar dilakukan evaluasi terhadap langkah yang dilakukan sebelumnya.
- Terdapat 19 debitur DPK seperti tersebut diatas lama tunggakannya sudah mendekati 90 hari, sehingga dikhawatirkan akan menjadi KL. Kecendrungan meningkatnya debitur DPK dari waktu ke waktu dimana posisi kredit DPK Desember 2024 sebesar Rp.1.262.837 ribu (15 debitur), Maret 2025 Rp.3.135.957 ribu (16 debitur) dan Juni 2025 Rp.3.778.105



ribu (19 debitur) agar mendapatkan perhatian serius dari team bisnis, dan diharapkan agar segala kesepakatan dengan debitur DPK ini dapat dipenuhi sesuai komitmen sehingga dapat menekan pertumbuhan NPL.

4. Untuk debitur lainnya yang saat ini tercatat belum mengalami permasalahan agar tetap terjaga berada dalam kondisi lancar, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring melalui AO sehingga terjalin komunikasi yang baik yang pada akhirnya dapat diketahui secara dini permasalahan yang dihadapi debitur.

Rekomendasi kepada direksi :

5. Pastikan pemenuhan beberapa temuan administratif yang perlu mendapatkan tindak lanjut dari seluruh bagian, terutama dari bagian perkreditan. Dari hasil exit meeting yang dilakukan pada 14 Mei 2025, disepakati batas akhir tindak lanjut untuk semua temuan adalah 31 Juli 2025. Dewan Komisaris mengharapkan agar seluruh temuan tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal ditetapkan.

1. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menerapkan Tata Kelola disetiap kegiatan disetiap jenjang Organisasi, Dewan Komisaris memastikan kepatuhan Direksi untuk menindak- lanjuti setiap temuan dari hasil pembinaan OJK, hasil pemeriksaan KAP, Internal Audit dan hasil pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penyaluran kredit dilakukan dengan melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap calon debitur, dimana calon debitur dimaksud adalah masyarakat umum terutama pengusaha lokal Gianyar, Denpasar, Klungkung dan daerah lainnya di Bali. Baik yang bergerak dibidang pariwisata dan turutannya serta sektor lainnya.
3. Dengan berakhirnya kebijakan tentang restrukturisasi sebagai dampak Covid 19 yaitu POJK 11/ POJK.03/2020 dan kembali menerapkan kebijakan restrukturisasi sesuai dengan POJK 33/POJK.03/2018, BPR diharapkan dapat menghindari memberikan kredit kepada calon debitur dari bank lain yang telah dilakukan restrukturisasi di bank bersangkutan, terutama untuk restrukturisasi akibat Covid 19. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa calon debitur telah mendapatkan pembinaan dari bank lain adalah dengan memanfaatkan SLIK (sistem layanan informasi keuangan) yang dikeluarkan oleh OJK.
4. Kehati- hatian dalam proses calon debitur mutlak harus dipegang oleh team bisnis, mengingat tren peningkatan debitur dengan Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seperti data yang telah diungkapkan sebelumnya.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Belum diwajibkan pembentukan Komite-2

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil.



6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanawari,S.Hub.Int., M.M.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanawari,S.Hub.Int., M.M.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun	0,00



Sebelumnya

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanaweswari,S.Hub.Int., M.M.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanaweswari,S.Hub.Int., M.M.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di	Tidak ada



BPR	
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Pande Ketut Tamara Ardhanareswari,S.Hub.Int, M.M.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Gede Wijaya Pande - Hubungan Keluarga
2.	Nama	Ir. I Komang Ginarsa
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak Ada



Direksi Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

I.	Nama	Ir. I Gede Wijaya Pande
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Pande Ketut Tamara Ardhanawari, S.Hub.Int, M.M. - Hubungan Keluarga
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Putu Virgatha Cintya Dewi, S.T., M.M. - Hubungan Keluarga

Ada hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali pada BPR. Ada hubungan keluarga Anggota PSP dengan Pemegang Saham lainnya dan Anggota Direksi pada BPR.

II. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

II.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp420.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp90.000.000

II.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp35.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	1 orang



Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp7.500.000
---	-------------

I.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

I.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

I.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp2.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0



2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam I (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--	---------



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 17 Januari 2025

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 2,58 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,33 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,67 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,32 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun



1.	Tanggal Rapat	14 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan: 1. Pembahasan tentang kelengkapan SOP dan Evaluasi Kebijakan 2. Perkenalan dengan Komisararis baru. 3. Pembahasan rencana kerja Audit dan Kepatuhan		
2.	Tanggal Rapat	10 Februari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan: 1. Tentang penyempurnaan SOP dan Surat Keputusan Direksi yang perlu di update dan disesuaikan dengan POJK terbaru 2. Evaluasi kinerja bulanan 3. Tindak lanjut terhadap temuan PE AI 4. Pembahasan mengenai kredit bermasalah		
3.	Tanggal Rapat	10 Februari 2025
	Jumlah Peserta	33 orang
Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi dan evaluasi bulanan dari direksi dengan seluruh karyawan		
4.	Tanggal Rapat	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	33 orang
Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi dan evaluasi bulanan dari direksi dengan seluruh karyawan		
5.	Tanggal Rapat	21 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan: Membahas SEOJK 02/ SEOJK.03/2025 yang baru diterbitkan oleh OJK Tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dan pemenuhan Modal inti Minimum bersama PE AI dan PE ManRisk terhadap TKS Bank.		
6.	Tanggal Rapat	11 April 2025
	Jumlah Peserta	33 orang
Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi dan evaluasi bulanan dari direksi dengan seluruh karyawan		
7.	Tanggal Rapat	11 April 2025



	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi pencapaian kinerja dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sampai dengan akhir Maret 2025 bersama pengurus. 2. Isu strategis terkait penyelesaian AYDA. 3. Kondisi kolektibilitas kredit. 4. Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan APUPPT PPPSPM.	
8.	Tanggal Rapat	14 April 2025
	Jumlah Peserta	33 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	
9.	Tanggal Rapat	05 Juni 2025
	Jumlah Peserta	33 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi dan evaluasi bulanan dari direksi dengan seluruh karyawan	
10.	Tanggal Rapat	13 Juni 2025
	Jumlah Peserta	20 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi dengan unit bisnis bank	
11.	Tanggal Rapat	08 Juli 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi pencapaian kinerja dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sampai dengan akhir Maret 2025 bersama pengurus dan Pejabat Eksekutif. 2. Isu strategis terkait penyelesaian AYDA. 3. Kondisi kolektibilitas kredit. 4. Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan APUPPT PPPSPM.	
12.	Tanggal Rapat	06 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	27 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Meeting koordinasi akhir bulan Juli 2025 bersama seluruh karyawan.	
13.	Tanggal Rapat	17 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang



	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi pencapaian kinerja dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sampai dengan akhir Maret 2025 bersama pengurus dan Pejabat Eksekutif. 2. Isu strategis terkait penyelesaian AYDA. 3. Kondisi kolektibilitas kredit. 4. Pemenuhan perhitungan PPKA dan CKPN.	
14.	Tanggal Rapat	12 Desember 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Meeting persiapan RBB 2026 bersama Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif	
15.	Tanggal Rapat	23 Desember 2025
	Jumlah Peserta	31 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pemantapan RBB Intern Tahun 2026 bersama seluruh karyawan	

Sehubungan dengan komposisi Dewan Komisaris yang belum lengkap, maka Rapat Komisaris dilakukan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris 1 orang.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Ketut Sudarsa, S.E.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	15 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Sehubungan dengan komposisi Dewan Komisaris belum lengkap, maka rapat Komisaris dilakukan bersama Direksi dan PE terkait

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

I.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

I.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

I.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR. Sadhu Artha.



16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Terdapat 4 kasus perdata terkait, yaitu :

1. Kasus perlawanan ahli waris atas rencana eksekusi Hak Tanggungan (Debitur atas nama Suhairi), saat ini kasus masih di Tingkat Kasasi, setelah persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memenangkan BPR. Sadhu Artha.
2. Kasus gugatan oleh Istri Debitur Suhari terkait debitur Suhairi memang tidak tercover asuransi jiwa. Pada persidangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menolak gugatan tersebut, dan saat ini kedua kasus ini sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap, sesuai keputusan Mahkamah Agung.
3. Merupakan kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Istri Suhairi, sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Gianyar.
4. Kasus gugatan melawan Hukum atas proses lelang yang dilakukan terhadap debitur Ni Luh Putu Ayu Kartini, yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Gianyar.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendesa Adat Desa Adat Saba
	Penjelasan Kegiatan	Upacara Tawur Agung Kesanga



	Jumlah (Rp)	Rp2.250.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendesa Adat Desa Wanayu
	Penjelasan Kegiatan	Pujawali Pura Samuan Tiga
	Jumlah (Rp)	Rp325.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pengempon Pura Ulun Carik Subak Desa Saba
	Penjelasan Kegiatan	Pecaruan di Piura Ulun Carik Subak Desa Saba
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	15 September 2026
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo Bali
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan BPR Sadhu Artha Aksi Sosial Peduli Bencana Bali
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	10 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pengurus (Pengempon) Pura Bukit Mentik Desa Adat Batur
	Penjelasan Kegiatan	Punia 2 buah tong sampah di Pura Bukit Mentik Desa Adat Batur
	Jumlah (Rp)	Rp819.800



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SADHU ARTHA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gianyar, 30 April 2026

PT BPR SADHU ARTHA



Pande Ketut Tamara Ardhanareswari, S.Hub.Inc.

M.M.

Direktur Utama

Ir. I Komang Ginarsa

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan